

**SKRIPSI**  
**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**  
**DI PULAU SULAWESI**

**ALIYYAH MUTI'AH YAHYA**  
**A011211018**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2025**



**SKRIPSI**  
**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**  
**DI PULAU SULAWESI**

Disusun dan diajukan oleh :

**ALIYYAH MUTI'AH YAHYA**  
**A011211018**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2025**



**SKRIPSI**  
**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**  
**DI PULAU SULAWESI**

Disusun dan diajukan oleh:

**Aliyyah Muti'ah Yahya**

**A011211018**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 2 Desember 2025

Dosen Pembimbing I

Dr. Fatmawati S.E., M.Si, CWM@  
NIP. 196401061988032001

Dosen Pembimbing II

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM@  
NIP. 19740752002121003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM@  
NIP. 19740715200212100



## DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PULAU SULAWESI


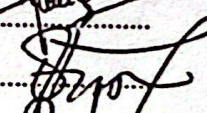


Disusun dan di ajukan oleh

**ALIYAH MUTI'AH YAHYA**  
**A011211018**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 2 Desember 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

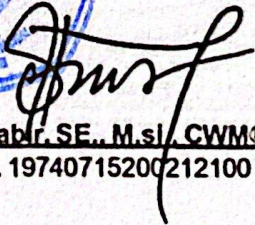
Menyetujui,

Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, S.E., M.Si. CWM®	Ketua	1..... 
2.	Dr. Sabir, S.E., M.Si. CWM®	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Retno Fitroanti, S.E., M.Si. CWM®	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM®	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Sabir, SE., M.si, CWM®**  
NIP. 19740715200212100



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aliyyah Muti'ah Yahya

NIM : A011211018

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sulawesi adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Aliyyah Muti'ah Yahya

A011211018



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan judul “Determinan Tingkat Pengangguran di Pulau Sulawesi”. Shalawat serta salam tak luput penulis limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para penerus perjuangannya yang telah mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan memberikan teladan yang mulia dalam kehidupan selalu dihadapkan akan berbagai kesulitan dan hambatan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Kepada ayahanda (Alm.) Yahya Tahang, terima kasih atas kasih sayang, keteladanan, dan semangat hidup yang menjadi motivasi penulis hingga mencapai tahap ini. Meskipun tidak dapat mendampingi perjalanan perkuliahan, penulis berharap ayah bangga atas pencapaian ini. Kepada ibu penulis, Ibu Nurmianti, terima kasih atas setiap pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tidak pernah berhenti mengiringi langkah penulis. Dukungan Mama adalah kekuatan terbesar yang memungkinkan penulis menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada Mama. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudari penulis, Fathiah Nur Azeizah Yahya dan Nur Afifah Ramdhani Yahya, atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan kesehatan dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. r, SE., M.Si. CWM®. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan u yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini. oga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan



dalam segala urusan ibu dan bapak dosen pembimbing.

2. Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE.,M.Si.,CWM® dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® selaku dosen penguji. Terima kasih atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh pegawai akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama masa studi dan hingga akhirnya dapat menyelesaikan ujian skripsi.
5. Sahabat-sahabatku Ciimut yaitu : A. Asyifaa Siti R, Ajeng Sesar Riani, Izza Amalia Hamsar, Ihnaya Salsabila Yunus, Nur Diana Nuari, St. Aisyah Nur Inayah, dan A. Alfiyyah Faiqah yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan saat suka maupun duka. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kehadiran kalian selama masa perkuliahan. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar kebersamaan ini tetap terjalin.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat UKM Basket Unhas Putri, terkhusus A. Tzania Cinta Wandira dan Keysha Isabel Ruben atas dukungan, bantuan, serta kehadiran yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan. Kebersamaan dan bantuan yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses studi hingga penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Ecobs yang senantiasa mengiringi dan mendukung setiap langkah penulis. Atas seluruh kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama, penulis mendoakan agar teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kelapangan dalam menjalani kehidupan.
8. Teman-teman KKN 112 Wonorejo timur, yang telah menjadi keluarga kedua na menjalankan program pengabdian. Terlebih kepada Mae dan Pae, ilis sangat menghargai segala bantuan, kebersamaan, dan dukungan telah diberikan. Penulis senantiasa berharap agar kalian diberikan udahan dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan ke depan.



9. Untuk diriku sendiri, Aliyyah Muti'ah Yahya, putri pertama yang menjadi harapan orang tua. Terima kasih telah berusaha dengan sepenuh hati dan tidak pernah berhenti berjuang untuk mencapai tujuan. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati berbagai rintangan dan tantangan yang hadir di sepanjang perjalanan, meskipun seringkali rasanya ingin menyerah namun selalu memilih untuk melangkah demi harapan dan kebahagiaan keluarga. Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa diri ini mampu dan pantas atas segala perjuangan yang telah dilakukan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang ikut memberikan dorongan, bantuan, dan dukungannya kepada penulis.

Makassar, 20 November 2025



Aliyyah Muti'ah Yahya



**ABSTRAK**

**DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA  
DI PULAU SULAWESI**

Aliyyah Muti'ah Yahya

Fatmawati

Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sulawesi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel gabungan yang terdiri atas data time series dan cross section yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan selama 15 tahun, yakni periode 2010–2025. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan data panel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel independen terdiri atas Upah Minimum Provinsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan, serta Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan hasil yang bervariasi, baik secara langsung maupun melalui jalur mediasi Pertumbuhan Ekonomi. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terutama dalam optimalisasi pengeluaran pemerintah dan penetapan upah minimum yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan pengangguran secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan

an.



**ABSTRACT**

**DETERMINANTS OF THE OPEN UNEMPLOYMENT RATE  
IN SULAWESI ISLAND**

*Aliyyah Muti'ah Yahya*

*Fatmawati*

*Sabir*

*This study aims to analyze the factors that influence the Open Unemployment Rate in Sulawesi Island. The research uses secondary data in the form of a combined panel dataset consisting of time series and cross-section data obtained from Statistics Indonesia and the Ministry of Finance over a 15-year period, from 2010 to 2025. The analytical method employed is multiple linear regression using a panel data approach. The dependent variables in this study are the Open Unemployment Rate and Economic Growth, while the independent variables include the Provincial Minimum Wage, Investment, Government Expenditure on Health, and Government Expenditure on Education. The results show that the Provincial Minimum Wage, Investment, Government Expenditure on Health, and Government Expenditure on Education all influence Economic Growth. Meanwhile, the effects of these variables on the Open Unemployment Rate vary, both directly and indirectly through the mediating role of Economic Growth. These findings highlight the importance of well-targeted development policies, particularly in optimizing government spending and setting minimum wage levels that can promote economic growth while simultaneously reducing unemployment in a sustainable manner.*

**Keywords:** *Open Unemployment Rate, Economic Growth, Provincial Minimum Wage, Investment, Government Expenditure on Health and Education.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
BAB II .....	17
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Teori Pengangguran .....	17
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	19
2.1.3 Upah Minimum .....	22
2.1.4 Investasi .....	24
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan .....	26
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan .....	28
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	29
2.2.1 Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran .....	29
2.2.2 Hubungan Investasi dengan Pengangguran .....	31
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dengan Pengangguran .....	33
2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan Pengangguran .....	34
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran .....	36
Hasil Penelitian Sebelumnya .....	37
Kerangka Pikir Penelitian .....	39



2.5	Hipotesis Penelitian.....	41
BAB III.....		43
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	43
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	43
3.3	Metode Analisis Data.....	43
3.3.1	Uji Asumsi Klasik .....	46
3.3.2	Uji t .....	48
3.3.3	Uji F .....	49
3.3.4	Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	49
3.4	Definisi Operasional Variabel .....	49
BAB IV .....		52
4.1	Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	52
4.1.1	Kondisi geografis pulau Sulawesi.....	52
4.2	Perkembangan Umum Variabel .....	54
4.2.1	Upah Minimum Provinsi.....	54
4.2.2	Investasi .....	56
4.2.3	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Pulau Sulawesi .....	58
4.2.4	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Pulau Sulawesi ...	61
4.2.5	Pertumbuhan Ekonomi .....	63
4.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	65
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	67
4.4	Uji Hipotesis .....	69
4.4.1	Uji t .....	71
4.4.2	Uji F .....	72
4.4.3	Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	72
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
4.5.1	Pengaruh Upah Minimum Provinsi (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) .....	74
4.5.2	Pengaruh Investasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) ....	75
4.5.3	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1).....	77
4.5.4	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1).....	78
4.5.5	Pengaruh Upah Minimum Provinsi (X1) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2).....	80
4.5.6	Pengaruh Investasi (X2) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	



(Y2).....	81
4.5.7 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X3) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) .....	83
4.5.8 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X4) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) .....	84
4.5.9 Pengaruh Upah Minimum Provinsi (X1) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y1) .....	86
4.5.10 Pengaruh Investasi (X2) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y1).....	88
4.5.11 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X3) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y1) .....	89
4.5.12 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X4) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y1) .....	91
BAB V .....	94
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN .....	103



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2024 dalam bentuk persen.....	4
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Provinsi di Pulau Sulawesi .....	53
Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas .....	68
Tabel 4. 3 Uji Heteroskedastisitas .....	69
Tabel 4. 5 Hasil estimasi besarnya pengaruh variabel yang diamati terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	70
Tabel 4. 6 Hasil estimasi besarnya pengaruh variabel yang diamati terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka .....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi Tahun 2010-2024.....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian .....	41
Gambar 4. 1 Grafik Upah Minimum Provinsi Pulau Sulawesi.....	55
Gambar 4. 2 Grafik Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Sulawesi .....	57
Gambar 4. 3 Grafik Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2024 .....	59
Gambar 4. 4 Grafik Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2024 .....	62
Gambar 4. 5 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2024 .....	64
Gambar 4. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sulawesi tahun 2010-2024 .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sebelum di LN:.....	104
Lampiran 2. Data Setelah di LN :.....	105
Lampiran 3. Hasil Uji Regresi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	107
Lampiran 4. Hasil Uji Regresi Terhadap TPT.....	108
Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan Pertama .....	108
Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik Persamaan Kedua.....	109
Lampiran 7. Uji Hipotesis Persamaan pertama.....	109
Lampiran 8. Uji Hipotesis Persamaan Kedua.....	110



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masalah pengangguran merupakan isu kompleks yang mendunia, tak terkecuali Indonesia. Kondisi ini timbul ketika individu yang aktif mencari pekerjaan tidak berhasil menemukan posisi yang sesuai dengan kualifikasinya. Berbagai faktor seperti fluktuasi siklus bisnis, kemajuan teknologi yang menuntut keterampilan baru, atau dinamika pasar tenaga kerja yang dinamis dapat menjadi penyebab utama. Tingginya tingkat pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan menurunnya produktivitas ekonomi.

Menurut Mankiw (2019), pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah berat. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebab dan membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan yang berlaku. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja ( Pitarnoto & Hayati, 2012).



tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mengindikasikan adanya ketidakimbangan di pasar tenaga kerja, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju ekspansi ekonomi (Ahmad, 2024). Data terbaru dari

Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada Februari 2024, jumlah pengangguran tercatat sekitar 7,2 juta orang, dengan TPT sebesar 4,82%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Februari 2023, ketika TPT mencapai 5,45%. Meskipun angka pengangguran terbuka di Indonesia telah menurun, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait pengangguran usia muda, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, serta dominasi sektor informal.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi adalah pulau Sulawesi, meskipun tren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingkat pengangguran di Sulawesi masih relatif tinggi dibandingkan beberapa wilayah lain di Indonesia. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-4 di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 174.600 km persegi. Pulau ini terletak di antara pulau Kalimantan dan pulau Maluku, terbagi atas 6 Provinsi yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Pulau Sulawesi memiliki peran strategis dalam perdagangan dan ekonomi Indonesia karena letaknya yang berada di jalur perdagangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kota-kota besar seperti Makassar berfungsi sebagai pusat distribusi barang yang menghubungkan berbagai daerah serta menjadi pintu ekspor ke luar negeri. Dengan posisi ini, Sulawesi memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian regional melalui sektor perdagangan yang semakin berkembang.



Sektor ekonomi utama di Sulawesi juga didominasi oleh pertanian, perikanan, pertambangan, dan perikanan. Komoditas unggulan seperti kakao, sawit, kopi, cengkeh, dan vanili menjadi andalan dalam ekspor, terutama

ke negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Selain itu, sektor pertambangan juga berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia. Industri perikanan di Sulawesi Utara dan Gorontalo juga menjadi sektor potensial yang terus berkembang dengan pasar ekspor yang luas. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, ekonomi Sulawesi masih sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu dampak dari ketimpangan wilayah ini adalah tingginya tingkat pengangguran, terutama di kota-kota kecil di Sulawesi. Pembangunan yang terpusat di beberapa daerah membuat lapangan pekerjaan lebih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah lain masih kesulitan dalam menciptakan peluang kerja yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat di daerah yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga tingkat pengangguran tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan merata di seluruh wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesempatan kerja di seluruh daerah di Sulawesi. Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu faktor krusial yang memengaruhi kondisi pengangguran. Kota-kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Manado, dan Kendari tumbuh pesat menjadi pusat-pusat ekonomi, namun banyak wilayah pedesaan masih terbelakang dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesempatan kerja. Sentralisasi pembangunan di wilayah perkotaan memicu urbanisasi tinggi, penduduk desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota, namun di tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan



mereka. Ketimpangan ini memperparah masalah pengangguran dan kesenjangan ekonomi di pulau Sulawesi. Berikut data Tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sulawesi tahun 2010– 2024

**Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2024 dalam bentuk persen**

TAHUN	SULAWESI UTARA	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGAR A	GORON -TALO	SULAWESI BARAT
2010	9,61	4,61	8,37	4,61	5,16	3,25
2011	10,1	6,78	8,13	4,69	6,74	3,35
2012	7,98	3,95	6,01	4,14	4,47	2,16
2013	6,79	4,19	5,1	4,38	4,15	2,35
2014	7,54	3,68	5,08	4,43	4,18	2,08
2015	9,03	4,1	5,95	5,55	4,65	3,35
2016	6,18	3,29	4,8	2,72	2,76	3,33
2017	7,18	3,81	5,61	3,3	4,28	3,21
2018	6,61	3,37	4,94	3,19	3,7	3,01
2019	6,01	3,11	4,62	3,52	3,76	2,98
2020	7,37	3,77	6,31	4,58	4,28	3,32
2021	7,06	3,75	5,72	3,92	3,01	3,13
2022	6,61	3,00	4,51	3,36	2,58	2,34
2023	6,1	2,95	4,33	3,15	3,06	2,27
2024	5,85	2,94	4,19	3,09	3,13	2,68

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di enam provinsi di Pulau Sulawesi mengalami perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi level maupun tren perubahannya selama periode 2010 hingga 2024. Beberapa provinsi seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat menunjukkan angka pengangguran yang relatif rendah dan stabil, sementara provinsi lain seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan fluktuatif. Sulawesi Utara konsisten menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi, dengan angka tertinggi mencapai 10,1% pada tahun 2011. Meskipun terjadi penurunan hingga 5,85% di tahun 2024, angka ini masih tergolong tinggi, menandakan adanya tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja.



tenaga kerja. Sulawesi Selatan, meskipun sempat mengalami penurunan signifikan hingga 3,43% pada 2023, kembali mengalami kenaikan menjadi 4,19% di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan pasar tenaga kerja yang memerlukan perhatian serius dari sisi kebijakan dan perencanaan ekonomi daerah. Di sisi lain, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara memperlihatkan tren penurunan pengangguran yang cukup stabil. Sulawesi Tengah berhasil menurunkan pengangguran dari 6,78% pada 2011 menjadi 2,94% pada 2024, sementara Sulawesi Tenggara juga mengalami penurunan dari 4,69% pada 2011 menjadi 3,09% pada 2024. Kendati demikian, pencapaian tersebut tetap perlu dikaji lebih dalam, apakah penurunan ini didorong oleh pertumbuhan sektor produktif atau sekadar fenomena migrasi dan perubahan struktur demografi.

Gorontalo mencatat penurunan pengangguran dari 6,74% pada 2011 menjadi 3,13% pada 2024, yang menandakan adanya kemajuan dalam pembangunan ekonomi lokal. Sementara itu, Sulawesi Barat secara konsisten mencatat tingkat pengangguran yang relatif rendah dibanding provinsi lainnya, namun angka ini cenderung stagnan dengan hanya sedikit perubahan selama periode 2010–2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun stabil, penciptaan lapangan kerja di Sulawesi Barat belum mengalami akselerasi yang signifikan.

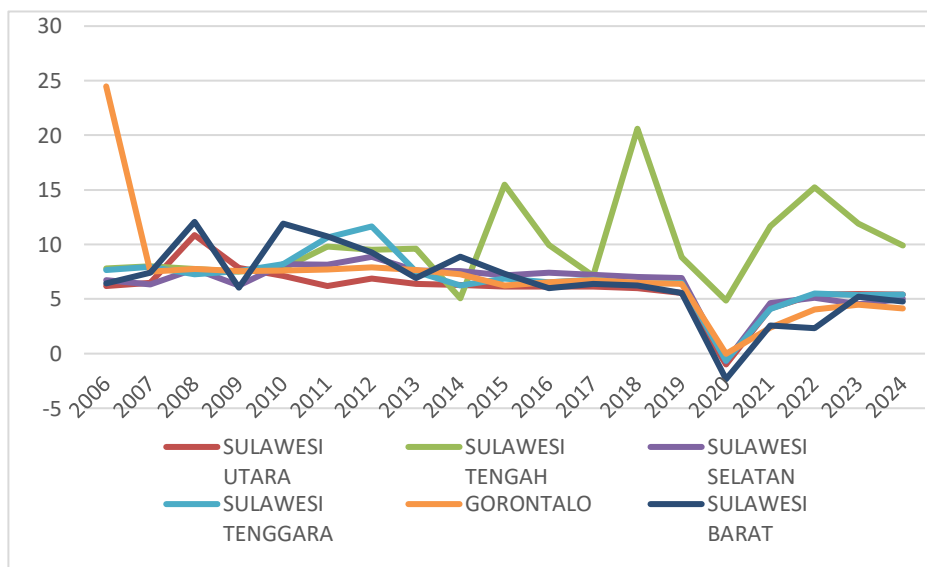
Selain itu, dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 menyebabkan lonjakan pengangguran hampir di seluruh provinsi di Sulawesi, yang mengindikasikan rentannya pasar tenaga kerja terhadap guncangan eksternal. Adanya perbedaan tingkat pengangguran terbuka antarprovinsi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum merata dan mencerminkan adanya ketimpangan

penciptaan kesempatan kerja. Ketimpangan ini tidak lepas dari perbedaan sosial ekonomi, kapasitas fiskal, dinamika investasi, kebijakan



ketenagakerjaan, serta laju pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran disuatu wilayah. Secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir, namun permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah, termasuk kawasan Indonesia Timur. Pulau Sulawesi merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang mencerminkan kondisi tersebut, dengan percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang cukup signifikan di beberapa provinsinya. Provinsi seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, misalnya, mengalami peningkatan dalam investasi serta pengembangan sektor industri. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut tergolong tinggi dan stabil, tingkat penganggurannya masih berada pada level yang relatif tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

**ir 1. 1 Diagram Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi Tahun 2010-2024**



Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di enam provinsi di Pulau Sulawesi selama periode 2010–2024, terlihat bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu berjalan searah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 20,6% pada 2018 dan 15,22% pada 2022, disertai penurunan tingkat pengangguran dari 4,61% pada 2010 menjadi 2,94% pada 2024, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penurunan pengangguran. Hal serupa terjadi di Sulawesi Selatan, di mana pertumbuhan ekonomi relatif stabil meskipun menurun dari 8,18% (2010) menjadi 5,02% (2024), disertai penurunan pengangguran dari 8,37% (2010) menjadi 4,19% (2024).

Namun, kondisi berbeda terlihat di Sulawesi Utara, di mana tingkat pengangguran masih tinggi yaitu 5,85% pada 2024, meskipun pertumbuhan ekonomi telah pulih menjadi 5,39%, setelah sempat negatif pada tahun 2020 (-0,99%). Di Gorontalo, pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,13% pada 2024 belum mampu menurunkan pengangguran secara signifikan, dengan tingkat pengangguran tetap di angka 3,13%. Sementara itu, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat juga menunjukkan ketidaksesuaian antara tren pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,4% pada 2024, namun tingkat pengangguran masih 3,09%. Di Sulawesi Barat, meskipun pertumbuhannya hanya 4,76%, tingkat pengangguran relatif rendah yaitu 2,68%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak selalu bersifat linier atau

- i. Beberapa provinsi seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pengangguran seiring dengan



meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang sesuai dengan teori ekonomi klasik. Namun, di provinsi lain seperti Sulawesi Utara dan Gorontalo, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum mampu menurunkan pengangguran secara signifikan, bahkan menunjukkan tren fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup luas dan merata. Ketimpangan antarprovinsi dalam hal kapasitas ekonomi, struktur industri, serta efektivitas kebijakan daerah turut memengaruhi dinamika ini.

Aktivitas tumbuhnya perekonomian adalah sebuah faktor paling penting pada penilaian kinerja sebuah perusahaan ekonomi, khususnya bagi analisis hasil pembangunan ekonomi bagi sebuah negara ataupun wilayah. Disebut bahwa ekonomi tumbuh ketika produksi barang maupun layanan naik dari masa ke masa. Karenanya, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan sejauh apa kegiatan ekonomi bisamelahirkan pendapatan tambahan ataupun kemakmuran sosial selama kurun waktu tersebut. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur untuk suatu keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2008). Peningkatan pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat ilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan Masyarakat pada ertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terus menunjukkan tan menggambarkan bahwa perekonomian daerah tersebut berkembang



dengan baik (Sukirno, 2008).

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRB pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi pasar tenaga kerja. Dalam hal ini, tingkat upah menjadi salah satu faktor penting yang turut menentukan seberapa besar tenaga kerja dapat terserap di suatu wilayah. Jika tingkat upah naik, itu dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang terserap yang artinya meningkatnya pengangguran. Sementara jika upah turun, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dapat meningkat yang artinya dapat mengurangi pengangguran (Ghofur, 2020). Ini sejalan dengan teori upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, mengatakan bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah (Saputra *et al.*, 2024).

Tingginya upah minimum yang ditetapkan mengakibatkan semakin banyak orang yang ingin bekerja. Namun disisi lain, kenaikan upah akan membuat perusahaan mengurangi jumlah pekerja dalam proses produksi dengan tujuan menekan biaya, sehingga akan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja dan pada akhirnya akan menyebabkan pengangguran semakin bertambah (Kuntiarti, 2018). Penetapan Upah Minimum Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi merupakan



yang kompleks dan multidimensi. Pemerintah Provinsi memiliki gan untuk menetapkan UMP berdasarkan pertimbangan tingkat n hidup layak (KHL) dan indeks harga konsumen (IHK). Kenaikan UMR

yang signifikan secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali menimbulkan dilema. Di satu sisi, kenaikan UMP dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi, terutama di sektor informal. Di sisi lain, kenaikan biaya produksi akibat kenaikan UMP dapat menjadi beban tambahan bagi pengusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kenaikan upah minimum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli pekerja, tetapi juga dapat menurunkan margin keuntungan UMKM dan membatasi kapasitas mereka untuk merekrut lebih banyak staf (Hikmah & Sishadiyati, 2024).

Dalam penelitian Sulistiawati (2012) menjelaskan bahwa Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.

Sementara berdasarkan hasil penelitian Fikri dan Alianis (2023) secara parsial “upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran”. Artinya ketika upah meningkat, maka pengangguran akan menurun. Sebaliknya ketika upah turun pengangguran akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori A.W Phillips yang disebut “Teori Kurva Phillips” yang mana menjelaskan bahwa dalam jangka pendek didapati hubungan negatif pada peningkatan tingkat upah pada



guran. menggunakan modal dan penggunaan teknologi yang lebih libanding menggunakan SDM yang lebih besar. Apabila di suatu negara ihan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh

pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008).

Pengangguran struktural terjadi ketika ada perubahan besar dalam ekonomi. Kenaikan upah minimum, sebagaimana dijelaskan dalam kurva permintaan tenaga kerja, akan menggeser kurva tersebut ke kiri, sehingga mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan perusahaan. Akibatnya, banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, terutama mereka yang memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (Mankiw, 2019)

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah investasi. Investasi, terutama yang bersumber dari dalam negeri, berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya meningkatkan output produksi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru.

Regulasi yang baik akan mendatangkan iklim ekonomi yang baik juga bagi suatu wilayah. Maka pemerintah harus selalu memiliki regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain yang menguntungkan pihak tertentu. Dengan adanya regulasi yang jelas tentu saja pihak yang akan menanamkan modal akan lebih nyaman untuk menanamkan modalnya atau bahkan membuka tempat usaha di tempat tersebut (Romadhona, 2023).

Investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Investasi an peran strategis dalam mengembangkan sektor-sektor produktif, atkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun,



dampaknya terhadap pengangguran sangat tergantung pada sektor yang menerima investasi dan kebijakan pemerintah yang mengarahkan investasi tersebut. Investasi yang bersumber dari pemerintah lebih berorientasi pada pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja. Dengan meningkatnya investasi yang berorientasi pada padat karya maka akan banyak menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka akan turun (Adewi dan Azhari, 2022). Salah satu kebijakan fiskal yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja adalah melalui peningkatan investasi. Dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik bagi investor domestik maupun asing.

Hadirnya investasi akan membentuk kegiatan produksi sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dengan adanya kesempatan kerja baru maka tingkat pengangguran akan berkurang. Hal ini berarti jika Tingkat investasi meningkat maka tingkat pengangguran akan menurun (Nadia & Amri, 2023). Di lihat dari sisi pengeluaran pemerintah, alokasi dana untuk membeli barang dan jasa berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2008).

Selain faktor ketenagakerjaan dan investasi, peran pengeluaran pemerintah juga sangat penting dalam menekan pengangguran. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya manusia, sedangkan pengeluaran di bidang kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan adalah kunci utama dalam kemajuan suatu bangsa. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan



berperan penting dalam memperbaiki produktivitas tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Disatu sisi, modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembangan investasi yang dicurahkan untuk pendidikan, karena kesehatan merupakan faktor penting agar seseorang bisa hadir di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak (Novista, 2022). Di sisi lain, modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan, karena banyak program kesehatan bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah, termasuk kesehatan pribadi dan sanitasi, di samping melek huruf dan angka; juga dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan. Akhirnya, perbaikan atas efisiensi produktif dari investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan yang meningkatkan harapan hidup (Todaro & Smith, 2015).

Namun, efektivitas kebijakan fiskal tersebut sering kali belum terlihat secara signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran, terutama apabila alokasi anggaran lebih banyak terserap untuk belanja rutin daripada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketersediaan lapangan kerja yang dihasilkan dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran yang dilakukan. Pengeluaran pemerintah yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.



alam konteks perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sedang dialami di ilawesi, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat berperan penting

sebagai stimulus yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dengan cara ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk memperluas kegiatan operasional mereka dan merekrut lebih banyak tenaga kerja.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran tidaklah sederhana. Pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi variabel antara yang menjembatani hubungan tersebut. Dengan kata lain, pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap pengangguran dapat bersifat langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa fakta dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis "*Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Sulawesi*".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi ?
- 2) Apakah investasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi ?



Apakah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung

melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi ?

- 4) Apakah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung di Pulau Sulawesi .
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung di Pulau Sulawesi .

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian



Penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan berupa informasi yang bermanfaat bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

## 2. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan dan gagasan terhadap pemerintah Indonesia khususnya di Pulau Sulawesi berkaitan dengan upah minimum, penanaman modal dalam negeri, pengeluaran pemerintah tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Dalam kajian ekonomi dan sosial, pengangguran didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang masuk ke dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, meskipun sedang aktif mencari pekerjaan (Todaro & Smith, 2015). Untuk mengukur pengangguran di dalam suatu negara biasanya digunakan tingkat pengangguran yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja atau tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur 15-65 tahun (Muana, 2001).

Menurut pandangan Keynesian, pengangguran timbul sebagai akibat dari lemahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika belanja konsumen, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, maka permintaan terhadap barang dan jasa ikut menurun (Mankiw, 2019). Penurunan permintaan ini berdampak pada menurunnya aktivitas produksi di sektor riil. Sebagai respons, perusahaan akan mengurangi volume produksi, yang kemudian diikuti dengan pengurangan jam kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja.



Dalam kondisi ini, pengangguran yang terjadi bersifat involunter, yaitu situasi di mana individu bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku tetapi tidak menemukan lapangan kerja. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi sangat

diperlukan untuk merangsang kembali permintaan agregat, baik melalui kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja negara maupun kebijakan moneter yang mendukung aktivitas ekonomi, agar tingkat pengangguran dapat ditekan secara efektif.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan Masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah social lainnya (Adhewi dan Ashari 2022). Menurut Sukirno (2006), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Memahami pengangguran sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi dan merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi ini. Pengangguran mengacu pada situasi di mana individu usia kerja, yang bersedia dan mampu bekerja, tidak dapat menemukan pekerjaan yang menguntungkan meskipun secara aktif mencari pekerjaan.

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja at, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat



menyerap tenaga kerja (Junaidi & Junaidi, 2023).

### 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur pencapaian dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu waktu ke waktu yang lainnya. Kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dalam kuantitas dan kualitas outputnya. (Sukirno, 2008).

Pengukuran Pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan menghitung pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan PDRB ini digunakan sebagai indikator apakah kebijakan yang telah dilaksanakan efektif atau tidak. Penghitungan pertumbuhan biasanya dilakukan dalam waktu tahunan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang Pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode

Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses aan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini



pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh Masyarakat (Basri, 2010).

Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam mengurangi kemiskinan di mana pun, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi berdampak baik pada orang miskin dan kaya, maka hubungan antara menandakan peningkatan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator penting untuk menganalisis kemajuan pembangunan ekonomi di suatu negara.

Menurut Sukirno (2008) ada 4 (empat) teori-teori pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori pertumbuhan klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

#### 2. Teori Schumpeter

Teori schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat teruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi



memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.

### 3. Teori Harrod-Domar

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori harrod-domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis harrod-domar menggunakan pemisahan-pemisahan berikut: barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan adalah proporsional dengan pendapat nasional, rasio modal-produksi (capital output ratio) tetap nilainya dan perekonomian terdiri dari dua sektor.

### 4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Sebagai suatu perluasan teori Keynes, teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Teori pertumbuhan neo-klasik melihat dari sudut pandangan yang berbeda yaitu dari segi penawaran menurut teori ini, yang dikembangkan oleh abramovis dan solow. Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

Menurut Ardian *et al* (2022) Terdapat yang bisa menjadi parameter dalam mengamati pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah sebagaimana di bawah ini:

- a. Ketidakseimbangan pendapatan Pendapatan yang mutlak didistribusi secara berkeadilan, 80% terbawah populasi paling bawah kemudian ndapatkan 80% dari keseluruhan pendapatan, sementara 20% nya yang ing atas memperoleh 20% total pendapatan.



- b. Perubahan struktur perekonomian Berubahnya struktur lisasi ekonomi dialami karena relativitas bahwasanya peranan sektor tani pada nilai PDRB mengalami penurunan, sementara sektor peranan sektor industri kemudian mengalami peningkatan.
- c. Pertumbuhan kesempatan kerja Penduduk di indonesia berjumlah 240 jiwalebih, dan tingkat penganggurannya relatif tinggi serta terus mengalami penambahan luas dikarenakan krisis finansial sejumlah negara di dunia.

Tingkat dan penyebaran kemudahan Kemudahan dalam hal ini dimaknai selaku kemudahan untuk hal-hal yang memiliki keperluannya, baik memenuhi keperluan hidup sehari-hari, misalnya bahan pokok, layanan pendidikan serta medis, kehidupan guna beribadah, berekreasi serta berbagai hal lainnyae. Produk domestik regional bruto Salah satu konsepsi yang terpenting untuk membangun ekonomi daerah ialah konsep PDRB . PDRB adalah parameter kesuksesan perekonomian dari semua aktivitas perekonomian. Salah satu parameter dalam mengamati laju bertumbuhnya perekonomian di sebuah daerah ialah melalui penggunaan data PDRB.

### 2.1.3 Upah Minimum

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin (tunjangan transport, uang makan, dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk tunjangan hari raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin (Husain *et al.* 2023).



Berdasarkan Teori Pasar Tenaga Kerja Klasik, tingkat upah dan jumlah tenaga kerja ditentukan melalui mekanisme pasar bebas. Jika upah minimum

ditetapkan di atas tingkat ekuilibrium pasar, maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja (pengangguran) karena perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, kebijakan upah minimum yang terlalu tinggi dapat menciptakan pengangguran karena menekan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Dalam kerangka teori ini, pengangguran bukan disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat, tetapi oleh distorsi pasar tenaga kerja akibat intervensi eksternal seperti penetapan upah minimum

Teori David Ricardo mengatakan apabila tingkat upah nominal berada di atas tingkat upah minimal atau tingkat upah alamiah (*natural wage*), maka jumlah tenaga kerja akan meningkat. Jika tingkat upah nominal turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan turun. Akibatnya, menurunnya tingkat penawaran atas tenaga kerja akan mendorong tingkat upah untuk mengalami kenaikan sampai pada tingkat upah alamiah.

Upah Minimum Provinsi merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha 24 atau kerjanya. Disebut UMP karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Adapun, penetapan dan pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur serentak setiap tanggal 1 November setiap tahunnya untuk diberlakukan pada periode satu tahun berikutnya. Upah minimum provinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh provinsi atau kabupaten atau kota di satu provinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap provinsi atau kabupaten atau kota tidak sama karena tergantung nilai KHM di daerah bersangkutan.



Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penerimaan lapangan pekerjaan. Jika penduduk dapat memperoleh pekerjaan maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, akan tetapi jika masyarakat di daerah tersebut kebanyakan menganggur maka akan dapat menekan standar kehidupan yang rendah di daerah tersebut. Penetapan upah minimum didasarkan dengan penyesuaian dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan layak. Penentuan Upah minimum ini sangat sensitive karena ada kaitan hubungan dengan tingkat kemampuan usaha di setiap pekerja. Pekerja yang mempunyai bakat lebih perlu di beri upah lebih karena pekerja tersebut dapat menghasilkan barang produksi yang lebih dibandingkan dengan pekerja yang lain.

#### 2.1.4 Investasi

Hubungan antara investasi dan pengangguran dapat dijelaskan melalui teori pertumbuhan ekonomi Harrod–Domar. Menurut Harrod (1939) dan Domar (1946), investasi memiliki peran ganda dalam perekonomian, yaitu menciptakan permintaan agregat sekaligus memperbesar kapasitas produksi. Teori Harrod–Domar merupakan gabungan dari dua pendekatan pertumbuhan ekonomi yang menekankan peran investasi. Harrod (1939) menyoroti kestabilan laju pertumbuhan agar sesuai antara tabungan dan investasi, sedangkan Domar (1946) menekankan produktivitas investasi terhadap peningkatan kapasitas produksi. Keduanya memiliki kesamaan bahwa investasi menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



peningkatan investasi akan mendorong bertambahnya kapasitas produksi yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar, sehingga terdapat asumsi kondisi *full employment*. Dengan demikian, investasi tidak hanya

meningkatkan permintaan efektif masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan kerja melalui penambahan faktor-faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Harrod dan Domar menekankan bahwa untuk mencapai laju pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan investasi baru yang mampu menambah stok modal sehingga kapasitas produksi nasional dapat terus meningkat. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, investasi dianggap sebagai faktor produksi penting disamping faktor produksi lainnya. Pentingnya investasi dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Investasi adalah salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga apabila terjadi kenaikan investasi akan mempengaruhi kenaikan permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja.
2. Setiap kenaikan barang modal dalam suatu proses produksi akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Kegiatan investasi akan mempengaruhi perkembangan teknologi yang lebih modern.

Dalam teori ekonomi, investasi memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah jumlah seluruh pendapatan yang digunakan untuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah dalam wujud barang-barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Agregasi investasi dalam perekonomian suatu Negara adalah keseluruhan total belanja barang-barang modal yang digunakan untuk menjaga dan meningkatkan jumlah cadangan barang-barang yang tidak dikonsumsi secara langsung.



Dari pengertian-pengertian tersebut, investasi atau kegiatan penanaman merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan oleh suatu Negara maupun

perusahaan yang meliputi kegiatan pembelian barang-barang modal maupun perlengkapan-perengkapan produksi guna meningkatkan proses produksi dalam suatu perekonomian.

Pada penelitian Saefulloh dan Fitriana (2017) secara individual investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori Harrod Domar yang berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja pula. Namun pada penelitian (Saputra *et al* 2024) investasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengangguran Terbuka di Kota Mataram. Artinya semakin tinggi investasi maka akan menaikkan pengangguran. Ini menunjukkan terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai korelasi antara penanaman modal dalam negeri dan tingkat pengangguran.

### 2.1.5 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Peran pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat penting, karena mencakup penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan serta standar hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, mendorong insentif dan kegiatan usaha swasta, serta menciptakan keseimbangan regional dalam perekonomian.

Menurut Teori *Health Capital* yang dikemukakan oleh Grossman (1972), kesehatan dipandang sebagai salah satu bentuk modal manusia yang dapat diinvestasikan dan dikelola, baik oleh individu maupun oleh pemerintah. Dalam kesehatan yang baik dianggap mampu meningkatkan kemampuan g dalam bekerja dan belajar, sehingga berdampak pada peningkatan



produktivitas dan pendapatan individu. Pemerintah yang melakukan pengeluaran di sektor kesehatan secara tidak langsung memperkuat stok *health capital* masyarakat melalui penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk tersebut kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi karena tenaga kerja menjadi lebih produktif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan daya saing dan terserapnya tenaga kerja di pasar kerja.

Peningkatan kualitas kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesehatan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan investasi yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja (Nasution *et al.* 2021). Pemerintah perlu mengalokasikan pengeluaran di bidang kesehatan seperti penyediaan tenaga medis, obat-obatan, fasilitas puskesmas, dan rumah sakit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pengeluaran tersebut mampu memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan mental tenaga kerja, sehingga meningkatkan kapasitas kerja dan kemampuan belajar masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi akan terdorong ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran, terutama di negara berkembang yang sebagian besar tenaga kerjanya masih bergantung

pekerjaan manual.



### 2.1.6 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pada umumnya pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu investasi (human investment) dalam hal ini, proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi (Nasution *et al.* 2021).

Menurut teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker *et al.* (2015), pendidikan merupakan bentuk investasi yang mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi makro, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berperan penting sebagai instrumen investasi publik untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, tenaga kerja menjadi lebih terampil dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran, khususnya pengangguran struktural dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja mendorong produktivitas marginal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan output per pekerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengeluaran sosial, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi untuk memperkuat daya saing dan efisiensi tenaga kerja nasional.



pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya pada

jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya dengan baik sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi masyarakat dan hidup bangsa. Penelitian empiris mendukung teori ini oleh Hasibuan (2017) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpengaruh terhadap penurunan pengangguran, meskipun efeknya bergantung pada kesesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh *wage rigidity* atau kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya (Mankiw, 2019). Sehingga pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan tidak hanya disebabkan karena tidak ada perusahaan yang mau menerima atau sedang mencari pekerjaan yang cocok untuk mereka, namun karena tenaga kerja selektif mencari pekerjaan didasarkan dengan jumlah upah yang diterima. Meskipun jumlah pencari kerja merupakan indikator utama tingkat pengangguran, faktor-faktor lain seperti produktivitas tenaga kerja, struktur industri, dan kebijakan pemerintah juga berperan signifikan dalam menentukan tingkat pengangguran secara keseluruhan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah pengaruh upah minimum terhadap keputusan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja. Menurut Keynes, upah minimum



menempengaruhi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi melalui permintaan agregat dan rigiditas upah.

Dalam kondisi ekonomi yang belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, Keynes berpendapat bahwa kenaikan upah tidak serta-merta menyebabkan pengangguran. Jika daya beli pekerja meningkat akibat upah yang lebih tinggi, maka konsumsi rumah tangga juga meningkat, yang pada akhirnya mendorong permintaan agregat. Peningkatan permintaan ini bisa merangsang pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier, di mana peningkatan belanja masyarakat akan mendorong produksi dan investasi. Namun, di sisi lain, Keynes juga menyadari bahwa jika upah minimum terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan produktivitas tenaga kerja, perusahaan dapat meresponsnya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Selain itu, kenaikan upah yang signifikan juga dapat mendorong inflasi jika perusahaan menaikkan harga barang dan jasa sebagai kompensasi atas biaya produksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum perlu diterapkan secara hati-hati agar tetap dapat meningkatkan daya beli masyarakat tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan atau menghambat penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan upah minimum memberikan keuntungan bagi pekerja muda yang akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari yang mereka dapatkan, tetapi merugikan bagi para pengangguran yang akan semakin kesusahan mencari pekerjaan. Kebijakan upah minimum dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jam kerja pekerjanya atau memecat beberapa pekerjanya. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah upah yang dipilih oleh para pengangguran. Karena ketika tingkat pengangguran itu tinggi maka posisi tawar akan melemah dan semakin rendah pula upahnya (Sjaroni, 2016). Hal yang dapat diambil adalah jika terjadi peningkatan upah minimum



maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran.

Pada hukum keseimbangan pasar dijelaskan bahwa terdapat tingkat upah tertentu di mana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu sama dengan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan, titik ini disebut sebagai titik keseimbangan. Jika upah minimum mengalami peningkatan di atas titik keseimbangan pasar maka dapat menyebabkan pengangguran. Sebaliknya jika upah turun, perusahaan mungkin akan menambah tenaga kerja karena biaya yang akan dibayarkan lebih rendah, sehingga lebih banyak pekerjaan yang tersedia dan akan mengurangi pengangguran (Basmar & Sugeng, 2020).

Tingkat upah minimum akan mempengaruhi minat dari tenaga kerja di suatu wilayah, yang artinya jika suatu wilayah memiliki upah minimum yang rendah minat pekerja untuk bekerja di daerah tersebut akan semakin berkurang. Hal tersebut akan berefek pada tingkat produksi di suatu perusahaan di daerah tersebut karena sulitnya menarik minat pekerja sehingga produk yang dihasilkan akan menurun karena tidak adanya pekerja. Begitupun sebaliknya, jika upah minimum di suatu daerah tinggi, maka tenaga kerja yang diminta akan semakin sedikit namun penawaran tenaga kerja akan semakin tinggi yang menyebabkan produk akan semakin meningkat, sehingga pemasukan akan meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

## 2.2.2 Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Investasi adalah awal dari pembangunan ekonomi. Sumber investasi suatu negara salah satunya dari PMDN yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran Negara dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kemakmuran dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi



pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima para pekerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa (Pandiangan *et al*, 2021).

Menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi investasi, karena tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan yang erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Meningkatnya jumlah investasi di suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar pendapatan yang dapat ditabung dan kegiatan investasi akan mengalami peningkatan.

Hubungan investasi terhadap pengangguran terbuka menurut Sirait *et al* (2018) dikatakan bahwa dengan adanya investasi maka akan meningkatkan kegiatan produksi lalu akan membuka kesempatan kerja yang baru. Dengan adanya kesempatan kerja baru ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran, dan juga sebaliknya jika investasi tidak ditingkatkan secara terus menerus maka produksinya juga tidak akan meningkat lalu kesempatan kerja juga tidak berkembang yang akhirnya akan berdampak terhadap pengangguran. Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia melalui transfer teknologi. Dengan demikian, PMDN dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Adanya investasi akan membentuk kegiatan produksi sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dengan adanya kesempatan kerja maka tingkat pengangguran akan berkurang. Hal ini berarti jika tingkat

investasi meningkat maka tingkat pengangguran akan menurun. Sehingga antara pengangguran dan investasi memiliki hubungan yang negatif.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal, penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, kegiatan usaha-usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan investasi baik itu investasi dalam negeri maupun investasi yang bersumber dari modal luar negeri. Penanaman modal atau investasi dalam teori ekonomi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang (Sukirno, 2006).

### **2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dengan Pengangguran**

Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Melalui investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan produktif lainnya, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan aktivitas dan menciptakan lapangan kerja.



Kesehatan merupakan komponen sumber daya manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, perbaikan kesehatan masyarakat harus diperhatikan untuk membangun generasi yang kompetitif. Perlu ada peran pemerintah melalui alokasi dana untuk fungsi kesehatan yang diharapkan akan memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Sumber daya manusia yang sehat akan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, alokasi untuk fungsi kesehatan juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan puskesmas atau rumah sakit yang membutuhkan tenaga kerja dalam proses pembangunannya (Althofia & Agustina 2015).

Tenaga kerja yang sehat akan lebih efisien dan produktif dalam bekerja, sehingga mampu meningkatkan output ekonomi nasional. Peningkatan produktivitas tenaga kerja tersebut kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi ini, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dapat mengurangi tingkat pengangguran secara tidak langsung, karena meningkatnya aktivitas ekonomi akan mendorong permintaan terhadap tenaga kerja di berbagai sektor.

#### **2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan Pengangguran**

Pendidikan memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Ketika pendidikan dari tenaga kerja semakin tinggi maka kesempatan kerja akan semakin besar. Pendidikan juga akan memberikan akreditasi profesional bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut dapat lebih diperhitungkan oleh penyedia kerja.

Perlu campur tangan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkemampuan rendah untuk bisa mengenyam pendidikan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, salah satunya yaitu melalui pengeluaran pemerintah. Selain itu, alokasi untuk pendidikan juga ditujukan untuk membangun



sarana prasarana seperti pembangunan sekolah. Proses pembangunan tersebut membutuhkan pekerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja (Althofia & Agustina 2015).

Penyediaan layanan dan infrastruktur pendidikan kepada masyarakat luas dapat dikaitkan dengan belanja pembangunan di sektor pendidikan. Kualitas hidup manusia diperkirakan akan meningkat seiring dengan kemajuan di bidang pendidikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional juga akan dipengaruhi oleh peningkatan kualitasnya SDM unggul (Ambya *et al.*, 2019). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker *et al.* (2015), pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi modal manusia yang dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan seperti pembangunan sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas dan beasiswa pada dasarnya sedang memperkuat kapasitas manusia agar lebih siap menghadapi perubahan struktur ekonomi dan tuntutan pasar kerja. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, masyarakat memperoleh keterampilan yang lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja modern. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan peluang kerja individu, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja secara agregat yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memperluas lapangan kerja di berbagai sektor,

pengangguran terutama pengangguran struktural dan friksional dapat  
Sebaliknya, rendahnya investasi pemerintah di bidang pendidikan akan



menghambat proses penciptaan tenaga kerja terampil, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat pengangguran.

### **2.2.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur sebuah keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro 2006). Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan dinamika perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi laju pertumbuhan, semakin baik kinerja perekonomian daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mankiw, 2019).

Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran sangat bergantung pada bagaimana pertumbuhan tersebut diimplementasikan dalam penciptaan lapangan kerja serta bagaimana manfaatnya didistribusikan di masyarakat. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menekan angka pengangguran, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta investasi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.



pertumbuhan ekonomi yang meningkat membawa dampak besar pada aspek. Ketika ekonomi berkembang, sektor produksi turut mengalami tan, sehingga peluang kerja pun bertambah. Hal ini berkontribusi pada

penurunan angka pengangguran karena lebih banyak orang yang mendapatkan penghasilan. Dengan adanya peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat juga meningkat, yang kemudian mendorong konsumsi rumah tangga. Tingginya konsumsi ini akan memperbesar permintaan terhadap berbagai barang dan jasa, sehingga roda perekonomian terus berputar dan pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut secara berkesinambungan. Teori hukum okun menyatakan bahwa, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemanfaatan angkatan kerja hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran (Mankiw, 2019).

Hukum Okun mengatakan bahwa jika pengangguran turun 1% maka PDRB nya akan meningkat sebesar 3%. Hal ini dapat terjadi karena jika PDRB pada setiap sektor mengalami peningkatan maka akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, karena peningkatan PDRB akan berkontribusi pada bertambahnya lowongan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh secara negatif terhadap pengangguran. Karena jika PDRB mengalami peningkatan maka pengangguran di daerah tersebut akan mengalami berkurang.

### 2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh Saputra *et al* (2024) menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel pengangguran terbuka Kota Mataram sebesar 87 persen, sedangkan untuk 13 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Secara parsial, variabel upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran Kota Mataram. Secara simultan antara variabel upah minimum regional, investasi dan



pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram.

Penelitian oleh Romadhona (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Kemudian dalam variable upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Dan untuk penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada jumlah pengangguran.

Penelitian oleh Fikri dan Alianis (2023) menunjukkan bahwasanya upah mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.

Penelitian oleh Amrullah *et al* (2019) Hasil regresi data panel menunjukkan secara simultan bahwa variabel variabel independen PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan, Sedangkan Upah Minimum Provinsi dan Inflasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka periode tahun 2007-2016. Total variasi tingkat pengangguran terbuka di provinsi Pulau Jawa mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen PDRB, UMP dan inflasi sebesar 93,35%.



Penelitian oleh Pakaya *et al* (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran ah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap guran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya, setiap kenaikan

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan meningkatkan pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan diikuti dengan menurunnya pengangguran terbuka di Povinsi Gorontalo., dan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Artinya, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur belum tentu dapat mengurangi pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu hubungan Upah minimum provinsi, investasi, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Tingkat pengangguran terbuka melalui Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan. Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Serta variabel intermediasi (penghubung) adalah Pertumbuhan Ekonomi. Variabel-variabel ini akan mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan di latar belakang.



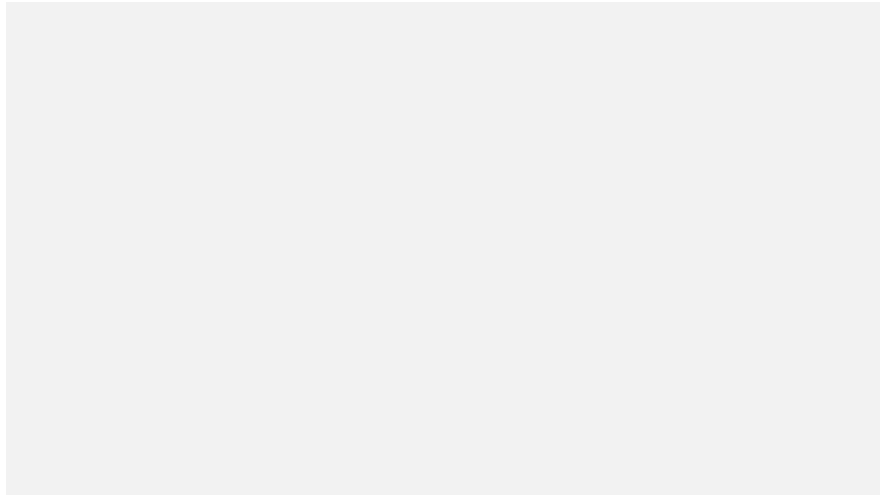
etika upah minimum naik, para pekerja memiliki lebih banyak pendapatan onsumsi yang dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa dalam

perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dan dapat mengurangi Tingkat pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Beberapa faktor lain seperti Investasi, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi pengeluaran pemerintah yang tinggi, diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Begitu pula dengan investasi, ketika terjadi peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal dalam Negeri maka akan terjadi pembelian barang modal dan perlengkapan produksi sehingga menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Para ekonom menyatakan investasi dan ekspor adalah motor pertumbuhan ekonomi atau *“engine of growth”*. Selain itu, dapat membawa teknologi dan keahlian baru ke dalam suatu negara. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas teknologi dalam negeri dan memajukan sektor-sektor tertentu, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Upaya dalam peningkatan pembangunan dan penurunan angka tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi yang merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan.



kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah hubungan pertumbuhan upah minimum regional, dan penanaman modal dalam negeri terhadap

jumlah tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan dengan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan diatas maka terbentuklah kerangka pemikiran untuk menjelaskan akar pemikiran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan teori atau pengamatan awal yang kemudian diuji melalui penelitian ilmiah. Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran



terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.  
 Diduga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif

terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi

4. Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

